

KONFLIK POLITIK DALAM LANGIT MERAH JAKARTA

KARYA ANGGIE D. WIDOWATI

Ngatma'in

dirjopenewu@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam kajian ini adalah: 1) konflik politik dalam Langit Merah Jakarta karya Angie D. Widowati, 2) sikap berperilaku politik tokoh dalam Langit Merah Jakarta karya Angie D. Widowati. Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan konflik politik dalam Langit Merah Jakarta karya Angie D. Widowati dan sikap berperilaku politik tokoh dalam Langit Merah Jakarta karya Angie D. Widowati.

Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Sumber data berupa sumber tertulis yakni novel yang berjudul Langit Merah Jakarta Karya Angie D. Widowati. Data penelitian ini berupa wacana yang mengandung unsur konflik politik dan sikap berperilaku politik tokoh. Instrumen pengumpulan data dilakukan dengan cara pencatatan. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Tahapan analisis data 1) reduksi data, 2) display data, dan 3) pengambilan keputusan dan verifikasi.

Kajian ini menghasilkan simpulan sebagai berikut: (1) Konflik politik dalam Langit Merah Jakarta karya Angie D. Widowati terjadi karena dipengaruhi (a) kondisi situasi politik yang tidak stabil, (b) Intervensi politik penguasa terhadap politiknya oposisi sangat kuat, (c) Terjadinya krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia. (2) Sikap berperilaku politik tokoh dalam Langit Merah Jakarta karya Angie D. Widowati ditunjukkan melalui gerakan politik yang dilakukan tokoh semenjak duduk di bangku kuliah.

Kata Kunci: Konflik Politik, Sikap Berpolitik, Langit Merah Jakarta

A. Pendahuluan

Karya sastra sebagai seni kreatif pengarang tidak dapat berdiri sendiri jauh dari masyarakat. Ia terikat oleh status sosial tertentu, misalnya norma, perilaku, dan aspek lain yang terjadi di masyarakat. Karya-karya diciptakan oleh sastrawan secara tidak langsung merupakan cermin budaya dan

perilaku suatu masyarakat.

Dalam proses kreatifnya, pengarang sering diilhami berbagai peristiwa dalam kehidupannya. Peristiwa-peristiwa itu dapat berasal dari hal yang ringan, misalnya peristiwa kehidupan keluarga sampai pada peristiwa yang kompleks seperti kondisi sosial atau konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Sama halnya dengan Anggie D. Widowati, dalam novelnya *Langit Merah Jakarta*; yang menceritakan konflik politik yang terjadi dalam masa reformasi juga diilhami hiruk pikuknya tatanan negara Indonesia sebelum dan sesudah bergulirnya reformasi.

Anggie D. Widowati sebagai penulis dan jurnalis mampu meramu alur cerita peristiwa detik-detik tumbangnya pemerintahan Orde Baru dengan detail dan akurat. Dari proses demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa sampai dengan waktu yang paling menegangkan bagi kaum intelektual dan masyarakat pada umumnya, yaitu peristiwa terbakarnya Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hariyanto, dan Hendrawan.

Lewat novel *Langit Merah Jakarta*, Anggie D. Widowati menyuguhkan sebuah realita peristiwa kekerasan yang terjadi saat menjelang dan sesudah proses reformasi. Lebih jauh lagi penulis ingin memberikan gugatan nurani kepada pemerintah dan masyarakat bagaimana konflik politik yang terjadi pada masa Orde Baru. Dengan alasan stabilitas nasional, pemerintahan Orde Baru menghalakan segala cara, dari ancaman psikologi sampai penculikan yang berujung pada kematian korban.

Menurut pendapat Webster (Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin, 2004: 9) istilah *conflict* berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan; yaitu berupa

konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti itu kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain. Secara singkat, istilah *conflict* menjadi begitu meluas sehingga berisiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal. Konflik diyakini merupakan suatu fakta utama dalam masyarakat. Konflik mempunyai fungsi-fungsi positif, salah satunya adalah mengurangi ketegangan dalam masyarakat, juga mencegah agar ketegangan tersebut tidak terus bertambah dan menimbulkan kekerasan yang memungkinkan terjadinya perubahan.

Inu Kencana Syafii & Azhari (2009: 6) berpendapat, Politik dalam bahasa Arabnya disebut "*Siyasyah*", kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggrisnya "*Politics*". Politik berarti cerdas, dan bijaksana; dalam pembicaraan sehari-hari seakan-akan mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan.

Masalah dalam kajian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah konflik politik dalam *Langit Merah Jakarta* karya Anggie D. Widowati? (2) Bagaimanakah sikap berperilaku politik tokoh dalam *Langit Merah Jakarta* karya Anggie D. Widowati?

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis meliputi: (1) teori sosiologi (Soerjono

Soekanto: 2007: 4), (2) teori kesusastraan (Wellek R. & Austin Warren: 1995: 109—133), (3) sosiologi politik (Rush, M. & Philip Althoff: 2005: 5), dan (4) analisis wacana kritis Norman Fairclough (1995: 98).

B. Metode

Kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Sumber data berupa sumber tertulis yakni novel yang berjudul *Langit Merah Jakarta* Karya Anggie D. Widowati. Sampul novel bergambar seorang wanita jurnalis dengan latar gedung tinggi dikelilingi kobaran nyala api, diterbitkan oleh PT Grasindo, Jalan Palmerah Selatan 22-23, Jakarta 10270 tahun 2003 dengan tebal 187 halaman, cetakan pertama tahun 2003; Editor: Neta, Penata Isi: Suwanto. ISBN: 979-695-628-4. Bagian atas bertuliskan judul novel, *Langit Merah Jakarta* dan nama penulis, Anggie D. Widowati.

Pada sampul belakang berwarna merah muda, terdapat cuplikan isi cerita proses penculikan Dery, mahasiswa demonstran. Selain itu pada sampul belakang novel ini juga memberikan benang merah isi ceritanya yaitu novel yang mengangkat peristiwa tumbangnya Orde Baru sebagai latar. Pojok kiri bawah terdapat nama penerbit “Grasindo” yang

beralamatkan Jalan Palmerah Selatan 22-23 Jakarta 10270. www.grasindo.co.id.

Data penelitian ini berupa wacana dalam novel *Langit Merah Jakarta* karya Anggie D. Widowati, yang mengandung unsur konflik politik dan sikap berperilaku politik tokoh.

C. Pembahasan

1. Konflik Politik dalam Novel Langit Merah Jakarta

Novel *Langit Merah Jakarta (LMJ)* terdiri atas dua belas bagian. Diawali dengan kalimat AKU TAK akan berubah. Menceritakan peristiwa tumbangnya Orde Baru sebagai latar (menjelang dan sesudahnya). Mengisahkan pengalaman seorang wartawati muda yang mendapat tugas meliput aksi-aksi mahasiswa yang kadang diwarnai bentrok melawan aparat. Ia yang juga mantan demonstran sangat menikmati tugas itu, sampai suatu hari ia harus menemui kenyataan; seorang teman dekatnya menjadi korban penculikan dan tidak lagi mengenali dirinya.

Depdiknas (2000:587) menerangkan bahwa konflik berarti perpecahan, perselisihan, pertentangan. Politik artinya pengetahuan mengenai ketatanegaraan. Jadi yang dimaksud konflik politik adalah perselisihan yang terjadi dalam sebuah pemerintahan.

Konflik politik pada prinsipnya bukan

merupakan hal yang baru. Konflik politik berkembang sejalan dengan perkembangan politik yang terjadi dalam suatu negara. Semakin banyak partai dalam sebuah negara semakin banyak konflik yang akan terjadi. Sebaliknya semakin sedikit partai politik dalam sebuah negara juga tidak dapat menjamin terjadinya konflik politik. Namun banyaknya konflik yang terjadi akan memberikan pendidikan politik yang sangat berharga, sehingga perkembangan konflik akan memberikan nilai positif terhadap perkembangan pemerintah.

Tokoh utama dalam novel ini adalah tiga sahabat yang berjuang bersama mahasiswa dan masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Orde Baru. Tiga sahabat tersebut adalah Fifie, mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia, Dery mahasiswa jurusan Antropologi, dan Argo mahasiswa jurusan Arkeologi. Mereka bertiga menjadi saksi sejarah dalam mengawal era baru bangsa Indonesia, Era Reformasi. Masa reformasi merupakan babak baru dalam perbincangan perkembangan politik di Indonesia. Perkembangan di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, hukum, kesejahteraan hidup warga negara, kesehatan, kebebasan berpendapat, dan beberapa perkembangan segi kehidupan lainnya.

Digambarkan bagaimana keributan pun sering terjadi. Perusakan terhadap kantor

partai sering terjadi. Pertikaian menelan banyak korban. Wartawan dan masyarakat sipil pun tidak luput dari amuk massa. Pintu gedung rusak, atap jebol, darah berceceran dan menggenang di setiap sudut ruangan. Gambaran tersebut seperti pada teks berikut ini.

Hari itu tanggal 27 Juli 1996, aku tersentak ketikan tiba-tiba beberapa keributan di dekat pagar.

“Serbu!”

“hancurkan, biadab!”

...

Beberapa pria dengan tubuh besar mengenakan baju kaos merah darah memasuki halaman kantor DPP PDI.

Praaaaang. Bluk. Klatak...(LMJ: 38-39).

Peristiwa konflik tersebut terjadi karena perpecahan di dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia. Perpecahan internal partai politik (PPP dan PDI) pada zaman Orde Baru dapat diibaratkan bagaikan telah menjadi 'menu makanan sehari-hari'. Salah satu faktor penyebabnya ialah intervensi pemerintah yang berlebihan. Puncaknya ialah perpecahan yang amat fatal dialami PDI. Partai ini pecah menjadi dua kubu yang saling bermusuhan. Kubu Soerjadi (Budi Hardjono) dan Kubu PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri. Peristiwa ini dipicu oleh keberpihakan pemerintah terhadap salah satu

kekuatan politik di tubuh PDI, yakni kubu di luar Kubu Megawati. Peristiwa 27 Juli 1996, semakin mempertegas keterlibatan rezim Orde Baru dalam konflik internal PDI, dan tentu saja semakin memperparah intensitas konflik antar kedua kubu politik di tubuh PDI.

Di berbagai wilayah nusantara, peristiwa 'kuda tuli' sering terjadi; yaitu peristiwa pengambilan hak milik kantor partai secara paksa. Aktivitas tersebut dilakukan pada malam hari. Konflik yang diwarnai dengan kekerasan fisik antar warga partai berlambang kepala banteng tersebut, bagaimanapun merupakan contoh sejarah kelam dunia kepartaian di Indonesia. Intervensi rezim tampak mengemuka. Selain mewariskan 'budaya kekerasan' Orde baru juga mewariskan bibit-bibit perpecahan politik yang menghawatirkan (Anas Urbaningrum, 1999: 120).

Setiap peristiwa konflik yang terjadi pasti menyebabkan jatuhnya korban. Korban mengalami luka ringan maupun berat pasti tidak dapat dihindari. Begitu pula dengan korban konflik politik. Diilustrasikan seperti pada penggalan teks berikut ini.

Beberapa orang diseret keluar dari ruangan itu. Aku segera menutup mataku, lalu bersembunyi di belakang gerombolan penyerang. Aku tak tahu, tubuh-tubuh yang diseret keluar itu sudah berupa mayat atau hanya pingsan. Bau anyir darah membuatku

hampir muntah. Kepala ber-kunang-kunang. Pening sekali. Aku tak melihat lagi rekan peliput berita di sekitar sini (LMJ: 41).

Konflik sangat berisiko, tidak hanya yang menjadi korban namun bagi masyarakat yang menjadi saksi. Kesedihan dan trauma sangat mendalam yang dapat mengakibatkan depresi mental. Untuk menjaga keamanan bagi kelompok yang berkonflik tentu berbagai cara dapat dilakukan, salah satunya yaitu mengamankan tempat konflik. Kepolisian atau lembaga keamanan lainnya seperti Koramil merupakan lembaga pemerintah yang dapat mengayomi/mengamankan tempat konflik agar tidak terjadi benturan massa yang lebih menegangkan bagi kedua kelompok atau masyarakat umumnya.

Kepentingan dan legalitas partai senantiasa diharapkan bagi pemimpin partai dan pendukungnya. Sebagai wujud kesetiaan terhadap partai politik simpatisan partai rela harus beradu kekuatan fisik dan psikis. Berbagai macam bentuk kesetiaan atau partisipasi anggota masyarakat terhadap partai politik. Salah satunya adalah turut serta simpatisan dalam kampanye terbuka dan sosialisasi dalam bentuk yang lainnya. Ada kalanya kesetiaan massa berujung pada sebuah 'premanisme' yang justru sangat berdampak negatif bagi anggota masyarakat.

Presiden Soeharto, seberapa pun

besarnya jasa yang beliau berikan kepada bangsa akan terhapuskan dengan satu titik kekhilafan yang dilakukan. Meskipun beliau bergelar 'Bapak Pembangunan', masyarakat senantiasa memaksakan tuntutan kepada pemerintah agar senantiasa memulihkan perekonomian bangsa Indonesia. Menumbuhkan perekonomian Indonesia tidak membalikan telapak tangan tetapi membutuhkan kerja keras dan kepercayaan seluruh elemen bangsa sendiri dan bangsa lain untuk memberikan pinjaman modal kepada pemerintah. Berikut ilustrasi kondisi peronomian, konflik politik dan sikap pemerintah dalam menyikapi kondisi bangsa Indonesia.

Di tengah suasana perekonomian yang kacau balau, kehidupan perpolitikan makin menyakitkan. Presiden Soeharto masih terus tersenyum dalam setiap kesempatan tampil di televisi. Entah apa maksud senyuman itu. Tidakkah dia melihat bahwa masyarakat sedang kelaparan? Masyarakat sedang menunggu perbaikan dapat segera terjadi (LMJ:58).

Sebagaimana disebutkan Anas Urbaningrum dalam bukunya; mengawali tahun 1998, dunia ekonomi bangsa Indonesia tampak semakin goyah, *Econit Advisory Group*, sebuah lembaga konsultasi ekonomi yang dipimpin oleh Rizal Ramli, menyebutkan

bahwa periode Juli 1997-Januari 1998 merupakan tahap kebangkrutan konglomerat. Tahap ini terjadi sebagai akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kondisi ini terutama terjadi pada konglomerat yang memiliki utang luar negeri, tanpa dilindungi dan digunakan untuk investasi pada sektor *non-traded* dan usaha yang bersiat spekulatif. Tahap berikutnya ialah tahap kebangkrutan dunia usaha, yang disusul kemudian dengan tahap kebangkrutan keuangan negara (Anas Urbaningrum, 1999: 53).

Krisis ekonomi, yang diawali dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Krisis ekonomi tidak mampu dibendung, terus bergulir ibarat bola salju yang siap membesar dan menggulung ekonomi negara. Percepatan kemerosotan ekonomi nasional disebabkan masalah pokok yang dihadapi ekonomi Indonesia sejak bulan Juni 1997 (Anas Urbaningrum, 1999: 53—54).

Krisis yang melanda bangsa Indonesia bukan hanya krisis moneter tetapi juga krisis kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Namun di balik peristiwa sejarah pahit itu memberikan ruang kebebasan bagi seluruh elemen bangsa untuk memperbaiki sistem yang selama ini dijalankan oleh 'politik penguasa'. Berbagai cara yang dilakukan masyarakat untuk mengentaskan rakyat dari zona krisis, mulai dari aksi protes yang dilakukan oleh

mahasiswa maupun tokoh-tokoh masyarakat sampai pada seminar dan diskusi di beberapa universitas.

Perbincangan seputar pemulihan ekonomi bangsa dilakukan secara sembunyi. Hal ini bukan usaha masyarakat untuk melakukan kudeta tetapi belum berani terang-terangan. Budaya era Orde Baru manakala ada seseorang atau institusi membicarakan 'kekhilafan' pemerintah maka pemimpin forum tersebut pasti merasakan jeruji besi. Protes masyarakat hanya terdengar sumbang. Masyarakat tidak berani menyaringkan aspirasinya. Pers yang sebenarnya berfungsi sebagai lembaga kontrol pemerintah pun belum sepenuhnya menunjukkan taringnya. Jika ada di antara media komunikasi yang berusaha mengeluarkan taji, terpaksa mereka tumpulkan sendiri. Gambaran ketakutan media seperti pada cuplikan berikut ini.

Pers yang keras belum terlihat menunjukkan giginya. Kritikan-kritikan yang agak pedas diprotoli oleh redaktur, karena ada semacam ketakutan terselubung. Aku merasakan bangsaku ini telah teracuni penyakit ketakutan yang mendarah daging. Terlalu lama masyarakat selalu ditakut-takuti oleh pemerintah dan militer dengan tekanan-tekanan (LMJ: 58).

Evaluasai masyarakat pada pemerintah masih diliputi fobia yang luar biasa.

Masyarakat merasakan kecemasan apabila merasa silap lidah. Pemerintah tidak segan-segan memanggil tokoh masyarakat yang dianggap berbica 'salah'. Lembaga militer yang mendapat tugas untuk 'membersihkan' masyarakat yang dianggap kurang menaruh hormat kepada pemerintah.

Budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme telah berurat saraf pada periode Orde Baru. Banyaknya kasus korupsi yang tidak pernah terselesaikan secara bijaksana. Kolusi dan nepotisme terjadi di mana-mana. Mulai dari pemerintahan tingkat RT sampai lembaga tinggi. Lembaga eksekutif pemerintah harus orang-orang yang senantiasa tunduk atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan presiden. Berikut ilustrasinya.

Aksi penolakan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme mulai marak di tengah masyarakat.... Tokoh-tokoh masyarakat yang menentang Presiden Soeharto mulai berani menunjukkan sikapnya. Namun pada saat SU MPR tahun 1996, menunjuk Presiden Soeharto terpilih kembali menjadi presiden untuk yang kesekian kali. Bahkan putri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana, ditunjuk menjadi menteri sosial. Tak pelak lagi protes datang dari mana-mana (LMJ: 58).

Meskipun pelaku KKN tidak pernah mendapat hukuman yang sepadan. Namun akhirnya bau 'tidak sedap' tercium pula oleh

masyarakat. Unjuk rasa digelar di mana-mana menghujat pemerintahan Presiden Soeharto yang dinilai melakukan kecurangan terhadap anak cucu bangsa Indonesia. Budaya KKN itu terendus kuat setelah putri sulungnya Soeharto diangkat menjadi Menteri Sosial. Kemarahan rakyat Indonesia tidak bisa dibendung lagi. Ini wajar karena selama beberapa tahun bangsa Indonesia dikebiri eksistensinya.

Benturan fisik antarmahasiswa dan lembaga pelindung masyarakat semakin intensif karena semakin hari unjuk rasa dari mahasiswa semakin tiada hentinya. Akibat dari maraknya unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa menggelitik pemerintah untuk melakukan pencegahan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melarang mahasiswa melakukan demonstrasi di kampus.

Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penertiban kampus yang melakukan demonstrasi sangatlah logis. Pemerintah menganggap kegiatan yang dilakukan kaum intelektual tersebut sangat berbahaya bagi eksistensi pemerintah. Setiap gerak langkah yang dikomandoi oleh mahasiswa bukan asal-asalan. Namun melalui diskusi dan kajian yang mendalam, sehingga setiap gerakan sudah pasti ditimbang asas kemanfaatannya. Selain nilai manfaat, mahasiswa juga berusaha

mengkaji berapa dampak negatif yang akan didapatkan mahasiswa demonstran. Pemerintah tidak ragu-ragu memberikan cap hitam bagi mahasiswa yang dianggap menjadi dalang pergerakan.

Unjuk rasa telah meluas di sudut-sudut kota, di setiap kampus pun marak unjuk rasa. Massa unjuk rasa tidak hanya dari kalangan mahasiswa tetapi juga masyarakat pada umumnya. Bagi mahasiswa demonstrasi dilakukan dengan cara turun jalan yang diwarnai teaterikal, meneriakkan yel-yel reformasi, atau pembakaran keranda mayat, membuat stiker pro reformasi. Bagi masyarakat luas melakukan unjuk rasa dengan cara menempelkan stiker pro reformasi. Stiker-stiker itu bertuliskan dengan kata-kata berbau reformasi. "Pro reformasi, reformasi sampai mati, reformasi yes, KKN no", berikut ilustrasinya.

Maraknya unjuk rasa makin melelahkan. Apalagi setiap hari berpindah tempat dari kampus ke kampus. Aku sendiri merasa betapa marahnya para mahasiswa. Mereka mulai meneriakkan reformasi di setiap sudut kota, menyebarkan pamflet-pamflet dengan naik di atas bus. Asyik bercampur tegang, menyaksikan pertunjukan politik mahasiswa yang juga mulai mendapat hati dari masyarakat.

Bukan hanya mahasiswa, kalangan masyarakat juga mulai terlibat. Mobil-mobil

pribadi menempelkan stiker-stiker di kaca depannya dengan kata-kata berbau reformasi. “Pro reformasi, reformasi sampai mati, reformasi yes, KKN no” (LMJ: 73).

Percepatan arus unjuk rasa menandakan semakin dekatlah reformasi segera terwujudkan. Gelombang reformasi terus berjalan menyusuri kampus dan penjuru negeri. Usaha mahasiswa mendapat angin segar dari masyarakat luas. Perbincangan reformasi mulai marak terjadi. Radio-radio swasta semakin nyaring menyuarakan gegap gempita politik mahasiswa. Teriakan reformasi menggema seantero pelosok nusantara. Mahasiswa menjadi tokoh utama dalam kegiatan ini. Teriakan menuntut turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan nyaris tidak pernah putus. Orde baru bagi mahasiswa dan rakyat adalah sesuatu yang harus dihindari, kalau mungkin harus dihilangkan dengan segera.

Politik jalanan hanya merupakan salah satu alternatif yang digunakan pergerakan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi pro-rakyat. Di samping cara demikian masih ada mimbar akademisi yang juga menjadi ciri khas pergerakan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi pro-rakyat yang sesuai dengan koridor akademis. Namun dalam situasi yang cukup panas, mahasiswa cenderung memilih politik jalanan sebagai cara

yang digunakan untuk ‘menggelitik’ pemerintah. Aktivitas politik yang dilakukan mahasiswa menjadi sangat dinamis, dari orasi politik sampai dengan aksi yang memicu tindakan kekerasan antara mahasiswa dengan aparat keamanan.

Korban respon-aparat keamanan yang berlebihan tidak cukup satu dua mahasiswa. Nyawa yang hilang akibat dari respon pemerintah sungguh memilukan bangsa ini. Sebenarnya mahasiswa bukan sesuatu yang yang menakutkan. Sebaliknya aparat keamanan pun bukan tembok raksasa yang membentengi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Namun sayang, aparat keamanan berubah menjadi barisan malaikat pencabut nyawa yang telah siap sedia mengajak pejuang pergerakan menghadap Sang Pencipta. Mahasiswa yang tertembak adalah Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hariyanto, dan Hendrawan, mereka mahasiswa Universitas Trisakti. Berikut ilustrasinya.

EMPAT MAHASISWA yang tertembak itu adalah Elang Mulya Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hariyanto, dan Hendrawan. Darah terus mengucur dari tubuh-tubuh itu, menggenangi lantai. Udara bercampur anyir darah memenuhi ruang klinik itu. Aku segera keluar klinik karena perutku tiba-tiba mual luar biasa (LMJ: 77).

Bila pemerintah bertindak reaktif seperti demikian lantas bagaimana dengan keberlangsungan pendidikan mahasiswa, bagaimana kelangsungan hidup mereka, bagaimana kondisi keluarga mereka, dan sejuta pertanyaan yang lain. Apakah tidak ada cara lain dalam menyikapi gelombang pergerakan mahasiswa selain dengan penembakan, pemukulan, penculikan? Siapa yang harus bertanggung jawab di balik kasus penembakan keempat mahasiswa tersebut? Dan sejauh ini hanyalah seremonial mengenang keempat serdadu reformasi tersebut.

Makna reformasi telah membahana di seluruh antero Indonesia. Sebagai wujud solidaritas kepada pergerakan mahasiswa ibu-ibu rela memberikan pelayanan tanpa lelah. Tepat pada 22 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Keputusan yang diambil Soeharto menyejukan hati seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya mereka yang kebetulan ikut aksi, atau hanya melihat aksi tersebut lewat media massa. Aksi-aksi unik dilakukan mahasiswa untuk merayakan kemenangan mereka. Sebagian mereka bersorak-sorak gembira, meloncat-loncat kegirangan, ada pula yang menceburkan diri ke kolam air mancur walaupun airnya keruh. Suasana gembira seperti mendapatkan gunung emas. Berikut ilustrasinya.

Akhirnya pada tanggal 22 Mei, Presiden

Soeharto menyatakan mengundurkan diri, sekaligus melantik Wapres B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Mahasiswa berteriak-teriak kegirangan, melompat-loncat ke sana-kemari, mendengarkan keputusan lengsernya Soeharto... LMJ: 83—84).

Sukaria yang dilakukan mahasiswa sangat mengharukan. Kenangan-kenangan menegangkan hilang dengan sekejab. Hal tersebut tidak mengurangi makna perjuangan mahasiswa karena pesta yang dilakukan tidak sebanding dengan perjuangan yang dilakukan sebelum presiden Soeharto lengser.

Sepanjang sejarah Orde Baru, tampaknya belum pernah gugatan terhadap *status quo* dan tuntutan akan reformasi didiskusikan sekerap tahun 1998. Bahkan tidak hanya sekadar didiskusikan, gugatan dan tuntutan itu semakin diyakini harus diakomodasi oleh sistem politik menjadi sebuah keharusan empirik yang tak tertawarkan. Krisis rupiah, krisis moneter, dan krisis ekonomi, pada gilirannya telah makin bermetamorfosis menjadi krisis politik. Maka, apa yang kerap disebut sebagai 'kebangkrutan ekonomi' makin dipahami pula oleh banyak orang sebagai penegasan terjadinya 'kebrangkitan politik'. Penanggalan *status quo* dan perwujudan reformasi lalu disebut sebagai keharusan

empirik dalam kerangka dua kebrangkitan ini.

Eep Saefullah Fatah (1998: xi—xii) mengemukakan lima argumentasi yang mencoba mengaitkan kebangkrutan ekonomi dengan kebangkrutan politik. *Pertama*, ketika kurs rupiah mengcapai angka di atas Rp 4.000 per dollar Amerika Serikat (AS), penjelasan-penjelasan ekonomi telah menjadi tidak relevan. Kurs itu tidak lagi memperlihatkan problem ekonomi, melainkan menegaskan adanya kompleksitas politik di balik krisis moneter.

Kedua, krisis ekonomi yang makin parah dan berlarut-larut menegaskan bahwa konsentrasi mengenai 'fundamental ekonomi kita kuat' ternyata lebih merupakan semacam manipulasi data atau upaya membohongi diri. *Ketiga*, berbeda dengan kenyataan yang kita temukan di sejumlah negara Asia atau Asia Tenggara lain, krisis ekonomi Indonesia menjadi sangat berlarut-larut lantaran disertai oleh adanya krisis kepercayaan yang akut terhadap kekuasaan yang sedang bekerja. *Keempat*, dalam konteks hubungan patrimonalistik dengan kekuasaan personal di atas, maka dunia ekonomi dan bisnis kita memiliki karakter yang tidak nasionalistis. Para pelaku ekonomi dan bisnis tidak terkondisikan untuk memahami kerangka operasi ekonomi bisnis mereka dari lingkup kepentingan negara-bangsa berjangka panjang, melainkan

kepentingan kelompok sesaat berjangka pendek. *Kelima*, krisis rupiah, moneter, dan ekonomi yang melanda Indonesia selama ini menegaskan, hampir tidak terbantahkan kekeliruan strategi politik Orde Baru.

2. Sikap Berperilaku Politik Tokoh dalam Novel Langit Merah Jakarta

Orang harus mengakui bahwa nilai-nilai dan kaidah-kaidah masyarakat yang diidam-idamkan itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat pada suatu waktu tertentu. Perbedaan yang tidak jarang menimbulkan pertentangan antara harapan dan kenyataan.

Sebagai anggota masyarakat yang memiliki kelebihan di bidang pendidikan, Fife senantiasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan pencerahan pemikiran. Pencerahan yang dibutuhkan masyarakat sangat variatif. Salah satunya di bidang pemerintahan atau politik bangsa Indonesia.

Fife, seorang sarjana, mantan aktivis yang mempunyai impian yang besar untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kesuksesan yang diharapkan Fife tidak hanya di bidang ekonomi namun sukses memberikan pencerahan pendidikan politik bangsa Indonesia. Berangkatlah ia ke Jakarta untuk memenuhi panggilan pekerjaan sebagai wartawan profesional dengan harapan mengubah nasibnya yang lebih baik dari pada

menjadi reporter honorer selama ini. Hal tersebut seperti dalam kutipan berikut:

“Sayang kan bila aku tak penuh panggilan ini, barangkali saja nasibku akan lebih baik daripada hanya menjadi reporter honorer di harian itu,” kataku mencari kepastian. (LMJ: 1).

Kutipan teks di atas menggambarkan seseorang memahami adanya bentuk pencapaian kesuksesan. Kesuksesan yang diinginkan adalah keberhasilan dalam memberikan pencerahan politik. Selain itu juga, Fifie ingin mendapatkan jaminan finansial yang lebih baik.

Semenjak menjadi mahasiswa, Anak bangsa senantiasa mengharapkan perbaikan sistem pemerintahan. Sebagai tunas bangsa, Fifie, Argo, dan Dery berharap mampu membangun pilar-pilar bangsa. berikut nukilan ilustrasinya.

Kami bertiga menginginkan perubahan. Kami sering berteriak di atas atap rumah kontrakan Argo itu, “Perubahan!...perubahan...perubahan... KAMI MENG-I-NGIN-KAN PER-U-BAHAN!” teriak kami serentak. Seperti biasanya, serentak kami tambahkan,

“...tapi mau dimulai dari mana, ya?” bisik kami sedih. Seperti biasanya suasana tiba-tiba senyap (LMJ: 11).

Sebagai pewaris bangsa, generasi muda senantiasa harus berpikir arah perjalanan roda bangsa Indonesia. Meskipun kondisi bangsa dalam keadaan krisis multidimensi tetapi anak muda harus senantiasa bergerak dan berkarya. Tokoh utama memiliki idealisme yang kuat dalam usaha memulihkan iklim politik di Indonesia dengan cara aktif dalam setiap gerakan mahasiswa.

Konflik politik mulai dirasakan berawal dari kehadiran dinas intelijen ke rumah Fifie. Intelijen tersebut memperingatkan ayah Fifie agar tidak mengizinkan aktivitas politik yang dilakukan Fifie, rangkaian peristiwa tersebut seperti dalam kutipan berikut ini.

Itu adalah prinsip sederhana tentang sebuah aktivitas politik. Setelah banyak berdiskusi, dan ayah merasa tidak bisa membelokkan kemauanku, akhirnya dia berpesan agar aku berhati-hati. Dia memberi tahu bahwa pemerintah sangat serius menangani para aktivis. Baru ayah bercerita kepadaku bila seorang intelijen telah mendatangi rumah kami dan berbicara dengan nada mengancam agar ayah melarang aku ikut demonstran (LMJ: 37).

Demikianlah kondisi mesin kekuasaan Orde Baru. Intelijen disebarkan di mana-mana. Tidak hanya di tengah-tengah masyarakat tetapi masuk ke perguruan tinggi. Sebagaimana pendapat Anas Urbaningrum

dalam bukunya *Ranjau-ranjau Reformasi Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto*, disebutkan, depolitisasi kampus lantas diperlakukan. Kebijakan-kebijakan NKK/BKK yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef tahun 1978 menandai era 'depolitisasi' tersebut. Dewan Mahasiswa 'diberangus' digantikan dengan lembaga senat mahasiswa yang secara sistemik eksistensinya di bawah bayang-bayang rektorat. Organisasi mahasiswa ekstrakampus dilarang melakukan aktivitasnya di kampus. Resimen mahasiswa yang harus melaporkan 'stabilitas kampus' kepada instansi militer di atasnya berkembang pesat. Aksi-aksi kritis mahasiswa dilarang, bila tidak mereka akan memperoleh realitas pahit dalam hidupnya, karena harus *droup out* dari kampusnya. Inilah masa-masa di mana mahasiswa dihadapkan pada pilihan-pilihan yang serba dilematis, akibat proses depolitisasi tersebut.

Kebijakan politik yang dijalankan pemerintahan Orde Baru menjadikan rakyat Indonesia mengalami ketidakseimbangan perekonomian. Krisis moneter menjadikan pabrik-pabrik tutup dan memutus hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. PHK terjadi karena nilai tukar rupiah terhadap dolar anjlok, bahan-bahan produksi dalam negeri di ekspor, dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri harus mengekspor dari negara

lain; akibatnya ketika nilai tukar rupiah melemah pabrik-pabrik tidak mampu lagi membeli bahan-bahan produksi.

Kalau dirunut siapakah sebenarnya mereka yang salah, pakar politik? Pakar politik hanya memikirkan kekayaan diri dan kelompoknya. Kesejahteraan rakyat menjadi prioritas yang terakhir. Elite politik seharusnya menjadi pelaku pencerahan dan pendorong terjadinya perubahan. Namun, lapisan ini tampak tidak lagi berada di tangan politikus yang memiliki komitmen yang besar untuk membangun demokrasi, budaya politik yang membebaskan rakyat dari krisis (Zainuddin Maliki, 2004: 5)

Sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk memikirkan kondisi negara. Fifie salah satu diantara sekian juta warga negara turut serta dalam memajukan dan mengkritisi kondisi bangsa Indonesia. Namun apa dikata, nilai empati Fifie tidak sebanding dengan keringat yang harus dikucurkan oleh pejabat pemerintah. Pelayan rakyat hanya bisa menghambur-hamburkan kas negara. Mereka berpesta pora di hotel-hotel berbintang dengan lagak tidak berdosa. Berbagai hidangan disajikan demi memuaskan perut yang banyak memakan uang rakyat. Apakah sejauh ini pemerintah kurang peka dalam menghadapi gonjangan-ganjing bangsa. Ilustrasi tersebut terdapat dalam cuplikan kalimat di bawah ini.

Oleh karena itu, kadang ada kemarahanku yang menggelegak luar biasa bila melihat pesta pora para pejabat. Aku melihat sisi lain yang menyedihkan di negeriku, tetapi para pejabat dan pemimpin negara ini berpesta pora di hotel-hotel mewah, dengan makanan suguhan yang berlimpah ruah. Sambil menikmati hidangan dengan para undangan, mereka tertawa-tawa...(LMJ: 59-60).

Pepatah Jawa mengatakan, jika orang belum sadar akan kesalahan yang ia perbuat, walaupun dinasihati seribu kali pun ia tidak akan sadar. Begitulah kira-kira perumpamaan pejabat pemerintah. Mereka terasa tidak menanggung beban berat yang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang harus dijalankan.

Gambaran rakyat dan politikus, sama-sama memaksa mengambil hak orang lain dengan cara berjamaah, bedanya para pakar politik mengambil hak-hak rakyat melalui duduk di dewan sedangkan rakyat dijalan. Pakar politik mengambil hak rakyat tanpa diketahui rakyat karena sistem yang mereka pakai tertutup (baca: korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi dasar) akibatnya kelakuan mereka tidak tampak. Sebaliknya protes mahasiswa sering mendapat kode merah dari pemerintah. Kritik-kritik dari mahasiswa tidak

dapat dinalar dengan cerdas. Pemerintah melalui rektor memberikan ancaman yang meruntuhkan semangat generasi bangsa.

Pendidikan politik yang diajarkan Orde Baru selama bertahun-tahun kepada rakyatnya ternyata tidak menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Sistem patron yang diajarkan tidak mengandung makna yang mendalam. Patronisme hanya menghasilkan kerugian yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, pemerintah, generasi yang akan datang sekalipun, tidak pernah ada yang mampu menggantikannya. Generasi-generasi emas yang seharusnya dididik dengan cara yang mulia harus menerima pendidikan yang bersifat doktrin. Anak-anak bangsa semestinya dijadikan harta warisan telah ditiadakan dengan cara yang tidak hormat. Permata-permata bangsa yang semestinya menghasilkan kilauan cahaya harus redup sebelum di asah. Mutiara yang menjadi duta-duta negeri harus dikubur sebelum nyawa hilang dengan sempurna.

Betapa sedihnya apabila pemangku generasi bangsa telah dicabik-cabik keberaniannya, dibabat habis nilai intelektualnya. Bagaimana kondisi detik-detik gugurnya pahlawan bangsa yang selama ini mendapat pendidikan politik yang salah. Generasi yang belum mengenal tanggung jawab sebagai orang tua. Generasi yang belum puas kasih sayang dari seorang ayah, generasi

yang masih rindu dengan belaian seorang ibu.

Itulah Dery, generasi yang menyimpan idealisme dan nilai kecintaan terhadap tanah tumpah darah berebut hidup dengan takdir. Dialah Dery yang tulus ikhlas membela masyarakat kecil untuk menuntut secuil keadilan. Dery, remaja yang suci, memiliki semangat dan cita-cita luhur seperti pahlawan kusuma bangsa. Dery, korban salah sistem yang harus meninggalkan sahabat perjuangan. Dery untuk selamanya berselimut sehelai kain putih, berdingding tanah, berteman kusuma bangsa, bersinarkan lampu kunang-kunang, bercengkerama dengan malaikat-malaikat mungil, berikut ilustrasinya.

DERY, INI Argo dan Fifie. Kami akan menikah beberapa hari lagi,” kata Argo memulai percakapan. Aku hanya diam, air mataku tak terasa terus menetes di pipiku. Di sebelah yang lain, Nyonya Tari, ibu Dery menunggu dengan mata sembab. Tangannya menutup mulut dengan menggenggam saputangan.

Hatiku semakin hancur menghadapi kepergian Dery ini. Aku hanya bersembunyi di belakang punggung Argo. Tangisku semakin keras. Air mataku terus deras mengucur, sedangkan Argo memegang tanganku. Wajahnya tegang. Kejadian ini berlangsung begitu cepat. Dengan perlahan Argo memegang nadi di leher Dery untuk lebih memastikan. Setelah melepaskan jemari

dari leher Dery, Argo menutupkan selimut ke seluruh wajahnya. Dery telah meninggalkan kami (LMJ: 185).

Bak kehilangan segunung emas, keluarga Dery, Fifie, Argo tiada harapan lagi melihat langkah indah dari Dery. Tiada lagi mendengar diskusi-diskusi politik dari Dery. Tiada lagi menatap sosok wajah yang penuh semangat nasionalis. Dery meninggalkan bangsa ini untuk selamanya.

Namun kepergian Dery bukan menjadi hilang semangat hidup keluarga, Fifie dan Argo. Kepergian Dery sudah meninggalkan nilai perjuangan yang luar biasa. Kepergian Dery sudah memberikan pendidikan politik yang lebih baik daripada cara yang dilakukan pemerintah. Kepergian Dery telah membuka mata dunia bahwa budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dihilangkan. Kepergian Dery memberikan keluasan berpolitik bagi masyarakat kecil. Kepergian Dery membuat ibu Dery semakin yakin akan perjuangan hidup. Kepergian Dery membuka mata pemerintah untuk lebih arif dalam memahami kondisi bangsa. Nama Dery akan selalu tertanam dalam keluarga Argo untuk selamanya.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap konflik politik dan sikap berperilaku politik

tokoh dalam *Langit Merah Jakarta* karya Anggie D. Widowati, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konflik politik dalam *Langit Merah Jakarta* karya Anggie D. Widowati terjadi karena dipengaruhi (a) kondisi situasi politik yang tidak stabil, (b) Intervensi politik penguasa terhadap politiknya oposisi sangat kuat, (c) terjadinya krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia.
2. Sikap berperilaku politik tokoh dalam *Langit Merah Jakarta* karya Anggie D. Widowati ditunjukkan melalui gerakan politiknya. Tokoh utama mempunyai idealisme yang kuat dalam memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan pemerintah. Sikap berperilaku politik tokoh tetap berkobar sejak duduk di bangku kuliah.

DAFTAR PUSTAKA

Anas Urbaningrum. (1999). *Ranjau-ranjau reformasi potret konflik pasca kejatuhan soeharto*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Anggie D. Widowati. (2003). *Langit merah jakarta*. Jakarta: Grasindo

---Depdiknas. (2000). *Kamus besar bahasa Indonesia*. (3th ed.). Jakarta: Pusat Bahasa.

Eep Saefullah Fatah. (1998). *Catatan atas gagalnya politik orde baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis*. New York: Longman.

Inu Kencana Syafie & Azhari. (2009). *Sistem politik indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Pruitt, D. G. & Jeffrey Z. R. (2004). *Teori konflik sosial*. Yogyakarta: Pustaka Relajar.

Rush, M. & Philip Althoff. (2005). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (2007). *Sosiologi Statu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wellek R. & Austin Warren. (1995). (4th ed). *Teori kesusastraan*. (Terjemahan Melani Budianta). Jakarta: Pustaka Gramedia Utama. (Buku asli diterbitkan tahun 1977)

Zainuddin Maliki. (2004). *Politikus busuk fenomena insensibilitas moral elite politik*. Yogyakarta: Galang Press.

* Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Surabaya